

**PARTISIPASI MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Jamika
Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung)**

Akhmad Basuni¹

ABSTRAK. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kondisi golongan miskin masyarakat perkotaan. Bagaimana partisipasi politik khususnya apakah menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 dan apakah budaya kemiskinan terkait dengan keputusan pemilih dari golongan masyarakat miskin untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Kemiskinan masyarakat perkotaan ada dalam bentuk kemiskinan kultural dan struktural. Kemiskinan kultural diindikasikan dengan rendahnya sumberdaya masyarakat, dan adanya hambatan budaya yang menurut Lewis disebut budaya kemiskinan memuat nilai-nilai yang dianut oleh golongan miskin. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yaitu program yang dilaksanakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang kurang tepat, atau sistem sosial ekonomi pemerintah tidak berpihak kepada rakyat miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, untuk menggambarkan partisipasi masyarakat miskin perkotaan dalam pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2004

Hasil penelitian menunjukkan masyarakat golongan miskin, tampak dari keadaan tempat pemukiman yang jauh dari kriteria pemukiman yang baik, pendidikan mayoritas Sekolah Menengah Pertama, jumlah yang tidak sekolah kurang lebih 35% dari jumlah penduduk. Penghasilan sebagian masyarakat setiap harinya sekitar 20.000 sampai 30.000. Partisipasi politik masyarakat golongan miskin dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2004 cukup rendah. Keterkaitan antara budaya kemiskinan dan keputusan pemilih dari golongan miskin, ditemukan dari beberapa alasan mengapa pemilih tidak memberikan suaranya, salah satu pandangan mereka adalah siapapun presiden yang terpilih tidak dapat merubah nasibnya untuk keluar dari kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan konsep budaya kemiskinan Oscar Lewis, karena itu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004, mereka mengambil keputusan untuk tidak memilih.

¹ Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Subang

**PARTICIPATION OF POORLY SUBURBAN SOCIETY IN GENERAL
ELECTIONS PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT REPUBLIC
INDONESIA IN 2004 YEAR**

***(A Study Case at Society Kelurahan Jamika
Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung)***

ABSTRACT. *The location of this research at Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, is aimed to know and understand the condition of social poorly suburban. How to used political participation especially their suffrage at general elections in 2004 year and what the destitution cultures has correlation with their decision to abstain.*

The destitution of suburban community is cultural and structural forms. The cultural destitution indicated with the society lower resource, there are obstacles of the cultures, Lewis called destitution culture contain of norms by destitution community. The destitution of structural affected by government policy to gave obstacles in exploitation resources. The government programs to the poorly suburban society minimalized and exact till they do not out of the poverty-line, or the system of social economic government not supported. The methods of research use qualitative approach in getting descriptive results which participation of poorly suburban society in general elections president and vice-president Republic Indonesia in 2004 year.

The results of research in that poorly suburban society at Kelurahan Jamika appear are condition, settlement far to worthiness, the educational quantity graduates of junior high school, amount out of them more less 35% inhabitant. A part of society income for everyday about 20.000 till 30.000. The political participation of poorly suburban society at general elections president and vice-president Republic of Indonesia in 2004 year is lower. The correlation between destitute culture and suburban voters decision founding a few reasons why didn't give suffrage, one of the their opinion whoever be president can not changes of their destiny. Those findings show according to the culture destitution concept by Oscar Lewis, caused in general election president and vice-president in 2004 year, they taken decision abstained.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemilu tahun 2004 tentunya sangat tepat dijadikan momentum politik bagi warga negara Indonesia untuk menentukan nasib bangsa di masa depan. Setumpuk harapan seluruh masyarakat Indonesia digantungkan melalui pemilu tahun 2004 khususnya pemilihan kepemimpinan nasional, yang berkecenderungan akan lebih demokratis. Pemilu sebagai media untuk memunculkan kepemimpinan nasional itu disambut dengan cukup beragamnya pandangan dan sikap masyarakat Indonesia. Beranekaragam pandangan dan sikap itu antara lain sebagai akibat dari beranekaragamnya status sosial anggota-anggota masyarakat. Berbagai pendapat bermunculan seiring proses sosialisasi pemilu baik di media massa cetak maupun /elektronik, mulai dari kelompok masyarakat elit sampai kelompok masyarakat arus bawah seperti kelompok masyarakat miskin perkotaan.

Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Yusar (2004), meskipun golongan miskin perkotaan mengalami kesulitan akses terhadap pemenuhan materi namun secara informal mereka mendapatkan informasi yang berkaitan dengan issue politik yang sedang terjadi secara aktual. Informasi tersebut didapatkan melalui obrolan dalam kehidupan pertetangga mereka sehari-hari dan tak jarang kaum miskin di perkotaan melakukan interpretasi mereka sendiri, terutama dalam hal penilaian terhadap para calon presiden dan wakil presiden; Hal tersebut adalah kejadian sehari-hari yang wajar dan alami. Pemilu 2004 lalu, setiap warga negara dari berbagai lapisan ramai membicarakan dan saling berkomunikasi dengan tajuk bursa calon presiden. Dari interpretasi yang mereka lakukan kemudian memunculkan pandangan dan sikap terhadap setiap calon presiden dan wakil presiden. Pada umumnya pilihan kelompok masyarakat miskin perkotaan mengarah pada nama satu calon tanpa didasarkan pada kepentingan masyarakat tersebut untuk mengubah atau memperbaiki kehidupannya, dalam artian mengedepankan sikap emosional daripada rasional. Mereka cenderung menjatuhkan pilihan semata karena pertimbangan ciri fisik, kecakapan berbicara, Patron klien, fanatik buta dan banyak dibicarakan oleh orang lain.

Warga miskin yang mengedepankan emosional dalam memberikan pandangan dan partisipasi politiknya kemungkinan disebabkan oleh beberapa karakteristik masyarakat miskin. Karakteristik itu timbul dari budaya miskin seperti tumbuhnya sikap hidup yang fatalistik atau pasrah kepada nasib (Lewis, 1952 dalam Gugler, 1998). Kaum miskin selalu dikaitkan dengan sifat fatalistik dan menyerah terhadap keadaan. Mereka menerima nasib dan tidak tampak upaya-upaya untuk melakukan perbaikan taraf hidupnya. Sifat fatalistik ini merupakan faktor determinan yang menyebabkan golongan masyarakat miskin menjadi miskin secara ekonomis.

Bentuk partisipasi masyarakat miskin dalam hal kepemimpinan nasional adalah hal yang signifikan dan tidak dapat dianggap remeh, berkaitan dengan kuantitas golongan miskin tersebut di Indonesia. Jumlah kaum miskin perkotaan jutaan jiwa adalah target perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam kampanye visual di media massa terutama

media cetak, dapat dilihat bahwa para calon presiden turun langsung dan berada di antara mereka. Hal ini tak lain adalah dalam usaha meraih simpati dari kaum miskin yang akan memberikan suara bagi pemenangan para calon presiden tersebut dalam pertarungan pemilu tanggal 5 Juli 2004 dan tanggal 21 September 2004. Hasil pemungutan suara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2004, menurut data KPU Kota Bandung cukup banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya padahal mereka sudah terdaftar sebagai pemilih, ketika jumlah yang tidak menggunakan hak pilih kedepan semakin banyak merupakan sesuatu hal yang tidak baik, ini mengindikasikan ketidakpercayaan rakyat terhadap elit politik dan pemerintah semakin kuat. Rakyat yang tidak ikut berpartisipasi (memberikan suara) mereka dengan alasan yang berbeda-beda.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka permasalahan yang menjadi konsentrasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana gambaran masyarakat miskin di Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004? 2) Bagaimana partisipasi masyarakat miskin di Kelurahan Jamika dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004? 3) Apakah ada keterkaitan antara budaya kemiskinan dan keputusan pemilih dari golongan masyarakat miskin untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2004?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai tindak lanjut dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kemiskinan, walaupun dengan fokus tema penelitian yang berbeda. Berbagai penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat golongan miskin lebih berfokus pada tataran interaksi sosial budaya, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menambah khazanah pengetahuan tentang partisipasi politik golongan masyarakat miskin perkotaan, yaitu pada peristiwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang secara induktif menggali dasar-dasar pemikiran masyarakat miskin perkotaan dalam menentukan pilihan politik mereka. Penelitian ini diharapkan dapat menggali aspirasi masyarakat miskin untuk perbaikan suasana perpolitikan Indonesia secara umum. Penelitian lapangan dengan sifat eksploratif, tidak terlalu mementingkan pada uji hipotesis. Dalam penelitian ini data dianggap sah walau hanya diperoleh dari informan kunci. Sampel yang digunakan adalah sampel purposif, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada tujuan, fungsi, dan kegunaan data yang diperlukan, dimaksudkan memilih sejumlah “kecil”, dan tidak harus representatif (Moleong, 2005: 35). Angka secara statistik dapat digunakan hanya untuk membantu dalam pemerian fenomena yang diteliti. Data diperoleh dengan melakukan pengamatan, wawancara, Studi Kepustakaan, dan dokumentasi. Data lapangan setelah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diklasifikasikan

menurut topik-topik yang dibahas dan dianalisis secara deskriptif analisis. Hal ini mengandung arti sebagai usaha untuk menyederhanakan sekaligus menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan data melalui langkah-langkah klasifikasi dan katagorisasi serta mengkaitkan antara satu dengan lainnya sehingga dapat tersusun rangkain deskriptif yang sistimatis, dapat memberikan makna dari aspek yang diteliti (Garna, 1999; dan Moleong: 85).

Analisis dan penafsiran data ditempuh melalui: *Pertama*, reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pengklasifikasian, pengabstraksian atau transparansi data yang diperoleh dilapangan baik melalui observasi maupun wawancara dan tanya jawab dengan informan kunci. *Kedua*, penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi dan data yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian tersebut bisa dalam bentuk uraian, bagan dan terakhir verifikasi yaitu penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran antar konsep melalui analisis deskriptif dalam bentuk kajian teoritik dan dalam bentuk fenomena yang diperoleh dilapangan. Proses analisis data tidak terpisah dengan pengumpulan data yang bersifat kualitatif.

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan di perkotaan berkaitan erat dengan struktur masyarakat dan kebudayaan kota setempat juga secara langsung berkaitan dengan tingkat kemiskinan di negara tersebut. Kemiskinan merupakan agenda besar badan dunia, dalam hal ini UNDP dan berbagai badan-badan regional maupun internasional lainnya termasuk organisasi non pemerintah (NGO) karena kemiskinan dipandang sebagai sebuah perampasan hak-hak hidup relatif (*relatif deprivation*). Kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang mau tidak mau terjadi di seluruh wilayah dunia terutama di negara-negara berkembang.

Tinggi-rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada 2 (dua) faktor, yaitu (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata; dan (2) tingkat pemerataan dalam distribusi (Todaro, 1995). Tingkat pendapatan nasional tiap kapita tertentu, distribusi pendapatan yang tidak merata, membuat kemiskinan menjadi menaik. Demikian pula pada tingkat distribusi tertentu, semakin rendah tingkat pendapatan rata-rata maka semakin meluas pula tingkat kemiskinan. Secara kuantitatif, cara pengukuran kemiskinan dilakukan dengan penyusunan skala garis kemiskinan, seperti diuraikan oleh Todaro, (1995:32) bahwa:

“Selama tahun 1970-an, pada saat minat menganalisis masalah kemiskinan dalam suatu negara dan antar negara dengan cara menentukan atau menciptakan suatu batasan yang disebut garis kemiskinan. Mereka mempelajari lebih mendalam dan menemukan konsep “kemiskinan absolut” yang dipakai secara meluas. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin “kelangsungan hidup”. Adapun masalah yang timbul kemudian adalah sulitnya menentukan tingkat hidup minimum karena tingkat tersebut berbeda dari negara ke negara dan dari daerah ke daerah, yang mencerminkan perbedaan

kebutuhan psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karenanya para ahli ekonomi memutuskan untuk membuat perkiraan secara konservatif tentang dunia kemiskinan, guna menghindari perkiraan yang terlalu dibesar-besarkan.”

Hasil pengukuran para ahli ekonomi, menyajikan data bahwa tingkat kemiskinan absolut (proporsi penduduk suatu negara dengan pendapatan nyata yang berada di bawah garis kemiskinan internasional) dan jumlah yang diklasifikasikan sebagai kelompok miskin absolut berada di kawasan negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.

Salah satu prasyarat keberhasilan program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan identifikasi *target group* dan *target area*. Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasi siapa sebenarnya “si miskin” tersebut dan di mana si miskin itu berada. Kedua, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat profil kemiskinan. Profil kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik ekonominya seperti sumber pendapatan, pola konsumsi atau pengeluaran, tingkat beban tanggungan dan lain lain. Juga perlu diperhatikan profil kemiskinan dari karakteristik sosial-budaya dan karakteristik demografinya seperti tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga, cara memperoleh air bersih dan sebagainya (Subagio, et al., 2001)

Dalam kasus Indonesia, secara umum memakai standar pengukuran kemiskinan dari standar Bank Dunia. Namun beberapa pendekatan atau tepatnya penyesuaian dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung batas miskin. Kajian utama didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan tiap kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2100 kalori perhari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Pola ini telah dianut secara konsisten oleh BPS sejak tahun 1976.

Ukuran kemiskinan yang dianut oleh negara-negara dari standar Bank Dunia, ternyata secara empiris kadang kadang kurang bisa menjelaskan fenomena kemiskinan. Terutama, membandingkan kemiskinan dengan kesejahteraan. Tidak semua kemiskinan identik dengan ketidak sejahteraan, demikian juga tingkat pendapatan yang tinggi, belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. *Sen poverty index* (SPI) yang merupakan formula yang dipergunakan untuk mengukur indeks kemiskinan, ternyata tidak mampu mengukur tingkat kesejahteraan. SPI yang lebih mendasarkan pada *poverty head account ratio* dan ini yang diambil dari penyebaran pendapatan tiap kapita (koefisien Gini) ternyata hanya mengukur kemiskinan dari tingkat pendapatan. Apakah tingkat pendapatan tersebut mencerminkan kemiskinan? Jawaban pertanyaan ini bisa betul dan bisa tidak, tergantung bagaimana pola konsumsi, pola kehidupan serta faktor jaminan keamanan akan kehidupan dari setiap negara kepada penduduknya. Studi Birdsall

(1995) di negara-negara Asia timur yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi (>7%), sedang (5%-6%) dan rendah (<5%) selama 30 tahun, menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang berbeda. Studi Birdsall menunjukkan bahwa Srilangka yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang relatif rendah (<5%) dan mempunyai indeks SPI yang rendah (yang menunjukkan tingkat pendapatan tiap kapita dalam US dollar rendah atau kurang dari 500 dolar AS tiap tahun) ternyata mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia, atau misalkan Brasil (yang mempunyai pendapatan tiap kapita diatas 5000 dolar AS tiap tahun). Anand dan Kanbur (1993) mengusulkan pola pengukuran kemiskinan dengan memasukan variabel-variabel non keuangan (*non financial variables*), seperti kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, fasilitas kesehatan yang luas dan murah, kesempatan kerja yang tinggi, angka kematian balita dan ibu yang melahirkan, tingkat kemungkinan hidup, sistem perumahan dan sarana kesehatan umum, listrik dan lain lain.

Dengan memakai ukuran yang baru Anand dan Kanbur melakukan uji ulang atas data dari Ahluwalia terhadap 60 negara. Hasilnya adalah kemiskinan tidak identik dengan kesejahteraan. Malcolm Gillis (1983) mencantumkan faktor tersebut sebagai *basic human needs and Social Indicators* dalam penghitungan kemiskinan. Ukuran kemiskinan yang lain dari BKKBN (2006), yaitu;

- 1) pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari,
- 2) anggota keluarga tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian,
- 3) bagian lantai rumah yang terluas dari tanah,
- 4) tidak mampu membawa anggota keluarga yang sakit kesarana kesehatan,
- 5) Menjalankan ibadah agama tidak teratur,
- 6) hanya setahun sekali dapat membeli satu stel pakaian baru,
- 7) luas lantai kurang dari 8 meter persegi untuk tiap penghuni,
- 8) tidak ada anggota keluarga yang berpenghasilan tetap,
- 9) Anggota keluarga tidak bisa baca tulis/sekolah.

Ukuran masyarakat miskin menurut BPS (2006) yang digunakan dalam penentuan yang mendapat bantuan langsung tunai yaitu:

- 1) luas lantai bangunan kurang dari 8 meter persegi
- 2) jenis lantai bangunan terbuat dari tanah/bambu/kayu murah
- 3) dinding tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester
- 4) tidak memiliki fasilitas buang air
- 5) penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) sumber air minum sumur, mata air tidak terlindung, sungai dan air hujan
- 7) bahan bakar untuk memasak menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah
- 8) mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
- 9) membeli satu stel pakaian dalam setahun

- 10) konsumsi makanan pokok yaitu makan dua kali dalam sehari
- 11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di sarana kesehatan
- 12) penghasilan keluarga Petani luas tanah 0,5 ha./di bawah 600.000 perbulan,
- 13) pendidikan Sekolah Dasar,
- 14) tidak memiliki tabungan/barang yang dijual dengan minimal 500.000,

Penentuan ukuran kemiskinan relatif walaupun sudah ditentukan menurut standar nasional suatu negara, tapi sulit untuk digunakan sebagai standarisasi ukuran di daerah, karena tiap daerah akan berbeda tingkat status sosial kehidupannya dengan daerah lainnya. Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menentukan ukuran kemiskinan berdasarkan analisis terhadap ukuran kemiskinan dari BKKBN dan BPS, yaitu:

1. Anggota keluarga makan kurang dari dua kali sehari
2. Mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
3. Anggota keluarga tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian
4. Membeli satu stel pakaian dalam setahun
5. Bagian lantai rumah yang terluas dari tanah
6. Dinding tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester
7. Tidak mampu membawa anggota keluarga yang sakit ke sarana kesehatan
8. Luas lantai kurang dari 8 meter persegi untuk tiap penghuni
9. Tidak memiliki fasilitas buang air
10. Menjalankan ibadah agama tidak teratur
11. Tidak ada anggota keluarga yang berpenghasilan tetap
12. Anggota keluarga tidak bisa baca tulis/sekolah
13. Penghasilan di bawah 600.000 perbulan

Kemiskinan memberikan peluang terjadinya penyebaran kemelaratan lainnya. Turunnya tingkat kesehatan merupakan dampak langsung dari kemiskinan. Adapun masalah kesehatan yang berkaitan dengan kemiskinan adalah, kurangnya konsumsi gizi, tingginya angka kematian bayi, dan kurangnya akses terhadap sarana pelayanan kesehatan. Hal ini mengakibatkan masyarakat miskin menjadi kelompok marjinal, tidak mampu menjangkau dan mendapatkan hak-hak hidupnya dikarenakan keterbatasan mereka dalam penyediaan sumber modal (uang) yang dapat menopang berbagai pemenuhan kebutuhan fisik minimal.

Menurut Todaro (1995), kemiskinan berdampak pula pada pendidikan. Penyebaran kesempatan pendidikan dasar merupakan usaha paling utama di antara semua usaha yang dilakukan oleh negara-negara berkembang. Permasalahan yang muncul adalah harga yang harus dibayar oleh seorang siswa untuk dapat bersekolah. Di Indonesia, kebanyakan mereka yang dapat bersekolah adalah siswa yang berasal dari kelas menengah dan menengah ke atas. Harga yang dibayarkan oleh siswa inilah menjadi penyebab rendahnya pendidikan di

kalangan masyarakat miskin. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin memberi implikasi terhadap melek huruf, pola pikir, dan cara pandang mereka terhadap berbagai peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Kemiskinan menurut Todaro (1995) terbagi menjadi dua bagian atas lokasi, yaitu kemiskinan di pedesaan dan kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan di pedesaan lebih bercirikan timpangnya distribusi kekayaan antara kota dengan desa di samping pola hidup masyarakat desa yang menggantungkan diri pada hasil-hasil produksi primer pertanian. Selain itu, kemiskinan di pedesaan di tandai juga dengan pola hidup subsisten atas hasil-hasil pertanian yang mengakibatkan tidak terjadinya surplus atas hasil-hasil komoditi pertanian primer.

Kemiskinan pada saat ini bukanlah keadaan alamiah lagi, tetapi akibat adanya struktur kekuasaan yang tidak adil. Kaum miskin saat ini tergantung pada mereka yang lebih berkuasa. Menurut Galtung, mereka tidak memiliki otonomi, kekuasaan atas diri sendiri yang membuat mereka mudah dieksploitasi dan di represi oleh pihak lain. Akibat langsung dari ketidakadilan sosial adalah kemiskinan struktural, artinya kemiskinan yang terjadi karena sebagian besar penduduk khususnya mereka yang miskin, dijauhkan dari sumber-sumber daya politik, ekonomi, sosial, kultural, informasi, komunikasi dan budaya. Kemiskinan struktural bukan hanya berakibat pada fisik orang tersebut (misalnya kurang makan atau tidak terjangkau layanan kesehatan), namun juga berdampak pada sisi psikologis dan identitas dirinya. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan tidak diberi kesempatan mengambil keputusan atas nasibnya sendiri, maka secara identitas mereka akan selalu ada di bawah, menjadi kelas sosial yang menghamba kelas sosial lainnya. Tentu saja situasi ini menjadi ladang subur bagi tumbuhnya kriminalitas serta sentimen antar kelompok. pada gilirannya, kriminalitas dan sentimen antar kelompok akan menjadi pembenaran bagi golongan yang berkuasa untuk semakin merepresi mereka.

2.1.2. Budaya Miskin

Pada tahun 1959 antropolog terkemuka Oscar Lewis mengira bahwa mungkin ada budaya miskin (*Culture of Poverty*) yang merupakan bagian dari pola pikir, pekerjaan dan kepemilikan yang mencirikan orang miskin, tidak peduli ia tinggal di Amerika atau negara lain di kota ataupun dipedesaan. Sebagai seorang antropolog Lewis; telah mengkaji masalah kemiskinan sebagai masalah sosial. dalam karyanya ia menceritakan tentang 5 (lima) keluarga miskin yang tinggal di Mexico City. Narasi yang ia kembangkan mendapat kritikan yang cukup tajam karena lebih dianggap sebagai karya sastra ketimbang karya ilmiah. Meskipun demikian karyanya banyak dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian berikutnya dalam konteks mengeksplorasi cara hidup masyarakat miskin dalam aktivitas kehidupan, tidak semata pada ekonomi saja. Lewis telah mencoba memahami kemiskinan dan mengelompokkan perangnya sebagai sebuah budaya, lebih akurat lagi sebagai sebuah sub budaya dengan struktur dan pemikiran tersendiri, sebagai sebuah cara hidup yang diturunkan dari generasi-kegenerasi sepanjang garis keturunannya. Lewis menganggap bahwa orang miskin hidup dalam sebuah budaya miskin, yang diajarkan pada masing-masing

generasi, sebuah kelompok tersendiri dari nilai, corak pikiran dan norma tingkah laku. Nilai, corak pikir dan tingkah laku ini membuatnya sulit untuk mengambil manfaat pada kesempatan apapun, untuk mereka dapat keluar dari kemiskinan. (Poplin, 1978: 256)

Selanjutnya Lewis memberikan gambaran yang lebih jelas tentang budaya kemiskinan, orang yang mempertahankan dan termasuk bagian dalam budaya ini, akan menunjukkan karakteristik prilakunya diantaranya; partisipasinya kecil dalam sebuah lembaga umum atau pada masyarakat yang lebih luas, dalam hal ini telah berkembang dalam kehidupan keluarganya. Orang yang dibesarkan pada budaya miskin selalu memiliki pandangan kuat mengenai rasa keterpinggiran, ketidaktertolongan, ketergantungan dan kerendahan. Karakteristik lain dari budaya miskin yaitu kurang dalam memberikan dorongan untuk mengawasi kekuatan, orientasi kekinian (pada waktu itu), sebuah pandangan yang menerima nasib dan fatalistik, (Poplin, 1978: 257). Karakteristik budaya miskin tentunya akan menimbulkan sikap apatis dalam semua aspek kehidupannya, dan menyebabkan sulit untuk beranjak dari status sosialnya kearah yang lebih baik.

Kendati masyarakat miskin dapat dikonotasikan sebagai kelompok yang lemah dan selalu tertindas, di lain sisi, pada tataran tertentu masyarakat miskin merupakan sebuah golongan tersendiri dan hanya berbeda dengan kelas-kelas sosial lainnya. Melalui pendekatan seni simbolik, Rochendi (2000) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki *way of life* tersendiri. Dapat diartikan pula bahwa masyarakat miskin memiliki apresiasi terhadap dunia luar dirinya berdasarkan pandangan subjektifnya, misalkan bagaimana ia memandang materi yang mungkin oleh kelas di atasnya tak berguna namun dapat ia manfaatkan meteri tersebut sebagai aksesoris interior ruangan gubuknya.

Masyarakat miskin memiliki kemampuan tersendiri dalam memandang dunia luar berdasarkan keterbatasan yang dimiliki mereka. Sebagai kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi, mereka memiliki kemampuan analisis sosial dan politik dengan cara yang berbeda dari masyarakat kelas di atasnya. Meski ditambahkan bahwa kemampuan analisis mereka terhadap peristiwa-peristiwa politik dan sosial sangat berkaitan dengan rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan yang pernah mereka alami. Seiring dengan meningkatnya saluran-saluran informasi, berbagai lapisan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh keuntungan darinya. Namun yang tetap menjadi pokok masalah adalah cara pandang mereka terhadap informasi yang telah tersedia melalui media-media informasi tersebut.

Penelitian yang dilakukan Yusar (2004) menyatakan bahwa terjadi keanekaragaman dengan cara pandang mereka terhadap peristiwa politik yang tengah terjadi. Secara induktif penelitian tersebut menyatakan bahwa golongan masyarakat miskin perkotaan memiliki apresiasi yang beraneka ragam, misalkan ada beberapa orang yang menyatakan keyakinannya terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu yang mampu membawa kemajuan, di sisi lain banyak pula yang menunjukkan sikap tidak akan memilih meski mendapat hak suara dengan alasan, siapapun yang akan menjadi pemimpin, kelak tidak akan membawa mereka beranjak dari kemiskinan. Lainnya memberi apresiasi calon pemimpin bangsa berdasarkan profil tubuh dan kemampuan

komunikasi politiknya. Pandangan di atas dapat dikaji dari keterbatasan golongan miskin tersebut dari berbagai aspek, yaitu ekonomi dan pendidikan. Berbagai pihak mengkhawatirkan bahwa dengan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi mereka dapat menghasilkan sikap apatisme dan tak ingin terlibat dalam proses politik untuk menentukan pilihannya memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

2.1.3. Masyarakat Miskin Perkotaan

Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih ada di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan isu sentral di Tanah Air, terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode 1997-1999, dan sampai dengan sekarang krisis itu belum pulih. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama setelah krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP, dan UNFSIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Sementara itu, *International Labour Organisation* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 % persen dari seluruh jumlah penduduk (BPS,1999)

Data dari BPS (1999) juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk secara hampir sama di wilayah perdesaan dan perkotaan, yaitu menjadi sebesar 62,72% untuk wilayah perdesaan dan 61,1% untuk wilayah perkotaan. Secara agregat, presentasi peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar di wilayah perdesaan (7,78%) dibandingkan dengan di perkotaan (4,72%). Selama dua tahun terakhir ini secara absolut jumlah orang miskin meningkat sekitar 140% atau 10,4 juta jiwa di wilayah perkotaan, sedangkan di perdesaan sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa (lihat Remi dan Herijanto, 2002).

Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin dari BPS dan Depsos (2002), jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta orang dan 15,6 juta orang (43%) di antaranya masuk kategori fakir miskin secara keseluruhan, prosentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia adalah sekitar 17,6 persen dan 7,7 persen. Ini berarti bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, sebanyak 18 orang di antaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 orang bukan fakir miskin dan 8 orang fakir miskin (Suharto, 2004:3). Selain kelompok itu, terdapat kecenderungan bahwa krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah orang yang bekerja di sektor informal. Merosotnya pertumbuhan ekonomi, dilikuidasinya sejumlah kantor swasta dan pemerintah, dan dirampingkannya struktur industri formal telah mendorong orang memasuki sektor informal yang lebih fleksibel.

Studi ILO (1998) memperkirakan bahwa selama periode krisis antara tahun 1997 dan 1998, pemutusan kerja terhadap 5,4 juta pekerja pada sektor industri modern telah menurunkan jumlah pekerja formal dari 35 persen menjadi 30 persen. Menurut Tambunan (2000), sedikitnya dari para penganggur baru tersebut diserap oleh sektor informal, industri kecil dan industri rumah tangga lainnya. Pada sektor informal perkotaan, khususnya yang menyangkut kasus pedagang kaki lima, peningkatannya bahkan lebih dramatis lagi. Di Jakarta dan Bandung, misalnya, pada periode akhir 1996-1999 pertumbuhan pedagang kaki lima mencapai 300 persen². Dari jumlah dan potensinya, pekerja sektor informal ini sangat besar, namun demikian, seperti halnya dua kelompok masyarakat itu, maka kondisi sosial ekonomi pekerja sektor informal masih berada dalam kondisi miskin dan rentan. Data itu memberi indikasi bahwa krisis telah membuat penderitaan penduduk perkotaan lebih parah ketimbang penduduk perdesaan, yang menurut Thorbecke (1999) setidaknya ada dua penjelasan bahwa:

- 1) krisis cenderung memberi pengaruh lebih buruk pada beberapa sektor ekonomi utama di perkotaan, seperti perdagangan, perbankan dan konstruksi. Sektor-sektor ini membawa dampak negatif dan memperparah pengangguran di perkotaan
- 2) Pertambahan harga bahan makanan kurang berpengaruh terhadap penduduk pedesaan, karena mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui sistem produksi sub sistem yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat perkotaan di mana sistem produksi subsistem, khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tidak terlalu dominan pada masyarakat perkotaan.

Kemiskinan di perkotaan lebih disebabkan oleh terjadinya proses pengkotaan (urbanisasi). Kota merupakan pusat dari berbagai aktivitas penduduk dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi. Sebagai pusat dari berbagai aktivitas penduduk tersebut maka kota memiliki daya tarik (*pull factors*) yang menyebabkan terjadinya aglomerasi penduduk di kawasan perkotaan. Dampak dari aglomerasi penduduk adalah banyak ketidaktertampungan penduduk kota dalam hal lapangan pekerjaan dan meningkatnya pengangguran.

Fox (1977) memperhatikan tempat perkotaan serta peranan budayanya di dalam masyarakat yang lebih luas. Menurutnya, banyak bidang keilmuan lain seperti sejarah, sosiologi, dan perencanaan kota yang memperhatikan dunia perkotaan sebagai suatu alam sosial tersendiri dengan dinamika serta kronologinya sendiri, yang dalam perspektif Fox (1977:18) bahwa

Kota merupakan produk sekaligus produsen dari persekutuan-persekutuan politik, sektor-sektor ekonomi, dan struktur-struktur sosial tertentu. Sebagaimana organisasi kekerabatan berhubungan secara fungsional dengan faktor-faktor ekologi, sebagaimana bentuk keluarga mencerminkan pranata-pranata politik ekonomi setiap masyarakat, demikian pula kota berhubungan dengan tatanan politik ekonomi di tempatnya berada. Jadi pendekatan interaksional memperlakukan kota

² Kompas, 23 November 1998; Pikiran Rakyat, 11 Oktober 1999

sebagai pementas peranan-peranan budaya di dalam organisasi sosial masyarakatnya. Seperti halnya pranata sosial yang lainnya, maka kota juga merupakan suatu bagian tingkah laku dari sebuah sistem yang lebih luas.

Kota selalu berada dan akan selalu berada dalam proses penyesuaian secara terus menerus dengan lingkungan sosial budaya eksternalnya. Lingkungan eksternal kota mencerminkan seluruh faktor sosial dan budaya yang mengenai masyarakat kota. Faktor sosial budaya ini meliputi tekanan politik, kondisi ekonomi, saluran komunikasi dan transportasi, dan nilai-nilai perdesaan. Faktor- demikian niscaya akan mempengaruhi arah perkembangan perkotaan dan tatanan sosial internal perkotaan.

Perkembangan internal perkotaan sangat dilandasi oleh fungsi dari kota tersebut (Fox, 1977). Kebanyakan kota menawarkan pemenuhan bagi kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum, demikian pula bagi masyarakat perdesaan. Aglomerasi penduduk di kota menjadikan kota-kota di berbagai belahan dunia memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini berpangkal pula pada fungsi kota seperti di atas. Dengan jumlah penduduk yang banyak, maka kota secara implisit memiliki beberapa kerentanan sosial akibat tawaran yang menggiurkan dari kota tersebut terhadap masyarakat luarnya. Salah satu masalah yang dialami oleh setiap kota-kota besar adalah ketidaktertampungan penduduknya dalam lapangan kerja.

Ketidaktertampungan angkatan kerja tersebut sangat berdampak pada penghasilan keluarga. *Inter America Development Bank Sustainable Development Departement* (2004) menyatakan bahwa kemiskinan di perkotaan bercirikan :

.....*Urban poverty can result in a broader cumulative deprivation, characterized by:*

- 1) *Inadequate or unstable income, which translates into inadequate consumption.*
- 2) *Inadequate, unstable or risky asset based, considering that there are many different kinds of assets-including social, human, financial, physical (Capital goods, equipment, etc.) and natural (for instance access to productive land and freshwater).*
- 3) *Poor quality/insecure housing and lack of basic services, squalid living conditions, risk to life and health to poor sanitation, air pollution, crime and violence, traffic accidents and natural disasters.*
- 4) *Discrimination and limited access to formal labor market, for instance for women, the discrimination they face in labor markets and access to credit and services; discrimination faced by certain groups based on their ethnic origin or caste; breakdown of traditional family and community safety needs.*

Kelompok miskin perkotaan dapat dipandang sebagai pengejawantahan konsep kelas. Konsep kelas sejak dahulu mengandung bahaya terutama jika diterapkan pada kehidupan manusia dan kondisi sosialnya (Dahrendorf, 1986). Pada mulanya istilah “kelas” digunakan oleh Ferguson dan Millar di abad 18,

semata-mata untuk membedakan strata sosial seperti yang kita artikan sebagai kedudukan dan kekayaan mereka. Pada abad ke-19, konsep kelas secara bertahap memperoleh corak yang makin pasti, Adam Smith telah berbicara mengenai “si miskin” atau “kelas pekerja”. Dalam karya Marx dan Engels, “kelas kapitalis” muncul di samping “kelas pekerja”, “kelas si kaya” di samping “kelas si miskin”, “kelas borjuis” di samping “kelas proletariat”. (Dahrendorf, 1986: 5).

Masyarakat miskin perkotaan merupakan sebuah kelas yang dibentuk karena keadaan ekonomi. Berdasarkan parameter yang telah dibentuk, mereka dapat dikatakan sebagai kelas bawah yang ditekan oleh kelas-kelas lain di atasnya. Pada tataran tertentu, masyarakat miskin memiliki sikap sentimen terhadap kelas-kelas yang berada di atasnya. Melalui pendekatan kekerasan oleh Johan Galtung (1998), kemiskinan merupakan sebuah bentuk ketidakadilan sosial, dan ketidakadilan sosial di Indonesia dikatakannya sebagai berikut :

“Adalah ketidakadilan yang dialami oleh sekelompok orang, kelas atau golongan tertentu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi. Ketidakadilan yang paling mendesak yang nyata bentuknya adalah kemiskinan. Mereka yang tidak punya uang namun tidak memiliki kesempatan untuk bekerja, yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak dapat menikmati pendidikan, layanan kesehatan yang layak dan seterusnya. Ketidakadilan sosial ini nyata-nyata terlihat dalam kasus penggusuran, di mana yang jadi korban hanya mereka yang lemah secara ekonomi, pemerintah tidak berani menggusur mereka yang kaya walau menyalahi banyak aturan dalam tata kota. Kasus lain dalam ketidakadilan sosial adalah biaya pendidikan yang terus menerus naik, yang berarti makin menjauhkan kaum miskin dari kesempatan memperoleh pendidikan.

Masyarakat miskin perkotaan dapat dikelompokkan, seperti pemulung, buruh, peminta-minta, pedagang kecil, atau masyarakat yang penghasilan ekonomi rendah dan kurang mencukupi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tersebut dapat identifikasikan sebagai kebutuhan dasar, yaitu; (1) makanan; (2) pakaian; (3) perumahan; (4) kesehatan; (5) pendidikan; (6) kebersihan/transportasi; dan (7) partisipasi masyarakat, (dalam Mulyanto dan Evers, 1982; V). Mereka hidup biasanya mengelompok pada suatu area tertentu, seperti kontrakan-kontrakan rumah yang murah dengan fasilitasnya jauh dari kemapanan, daerah-daerah yang bukan diperuntukan untuk tempat tinggal, dengan membangun gubug sederhana seperti disekitar area pembuangan sampah, di pinggiran rel Kereta Api. Kondisinya sebagai tempat tinggal tidak teratur, berdesak-desak, becek dan tidak memenuhi syarat kesehatan, termasuk penyediaan air dan listrik beserta prasarana yang minim.

Gambaran tentang pola konsumsi makanan dan bukan makanan dari kelompok Masyarakat (miskin dan bukan miskin), menunjukkan secara umum porsi konsumsi makanan dari rumah tangga miskin sampai sebesar 70,6% dibanding dengan pola konsumsi bukan makanan yang hanya 29,31%. Kondisi terjadi karena rumah tangga miskin masih menganggap kebutuhan makanan

sebagai kebutuhan utama mereka dibandingkan dengan kebutuhan sekunder yang lain. Pola ini tidak banyak berbeda dengan angka pada tahun 1990, yang pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan di rumah tangga miskin adalah sebesar 72,9%. Selanjutnya rata-rata orang miskin di wilayah perkotaan berpendidikan lebih tinggi daripada di wilayah perdesaan (Sutyastie dan Prijono, 2002: 20). Terkait dengan fenomena pemindahan dari desa ke kota, biasanya mereka yang pindah adalah orang muda dan berpendidikan. Mereka yang tua dan yang tidak berpendidikan akan tinggal di perdesaan karena mereka merasa tidak dapat bersaing bekerja di wilayah perkotaan. Lagi pula fasilitas pendidikan yang lebih baik dan lebih lengkap di wilayah perkotaan menyebabkan orang perkotaan memperoleh pendidikan yang baik.

2.1.4. Pemilihan Umum Tahun 2004

Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya pemerintahannya tidak absolut ataupun kerajaan yang dalam pelimpahan jabatan pemimpin negara (raja) dilakukan secara aklamasi atau ditunjuk penggantinya setelah pemimpin sebelumnya meninggal atau mengundurkan diri atau karena alasan lainnya. Dalam hal ini, Sukarna (1990: 9) mengungkapkan ciri-ciri negara yang menggunakan sistem politik demokrasi, yaitu:

- 1) Sistem politik demokrasi selalu ada pembagian kekuasaan. Dimana kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda.
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang fundamental.
- 3) Sistem politik demokrasi mengingat titik tekan asas dan tujuan untuk melindungi, mempertahankan, menjunjung tinggi serta memuliakan hak-hak asasi manusia, maka selalu terdapat dan dipertahankan adanya organisasi politik
- 4) Sistem demokrasi sebagai suatu sistem yang ampuh untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka setelah partai politik ada pula Pemilihan Umum sebagai ajang pertarungan merebut simpati rakyat dalam menitipkan suaranya untuk dilaksanakan dalam pemerintahan terpilih.
- 5) Adanya *open/democratic management* atau manajemen terbuka, yaitu ikut sertanya rakyat untuk pemerintahan melalui Pemilu yang bebas, adanya *social responsibility*, adanya *social control* dan adanya *social support*.
- 6) Adanya *rule of law* atau pemerintahan berdasarkan hukum dengan menjalankan asas *supremacy of law* (hukum yang tertinggi), *equality before the law* (persamaan di depan hukum), dan *protection of human right* (perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia).
- 7) Adanya kebebasan pers, yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan rakyat, baik kepentingan politik, sosial, ekonomi, budaya maupun kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia lainnya dari tindakan-tindakan yang bersifat *represif*, *otokratik*, *tyranik* dan *nepotik* yang dilakukan oleh siapapun.

- 8) Adanya *social control* yang dilakukan baik oleh suprastruktur maupun infrastruktur terhadap pemerintah yang memerintah baik secara konsultatif-persuasif-adaptif maupun dengan cara represif-investigatif.

Henry B. Mayo (1960, dalam Budiarjo, 1996;61) memberi definisi sistem politik sebagai berikut:

“Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.

Demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*values*) dan memerinci nilai-nilai ini dengan catatan bahwa perincian tersebut tidak berarti setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang diperinci tersebut, bergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Di samping itu, demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang karenanya mengandung pula unsur-unsur moral.

Pemerintahan yang memihak kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan dan mengakui *social control* yang dilakukan rakyat tentunya akan senantiasa melakukan yang terbaik bagi keseluruhan rakyatnya untuk menjadi pemerintahan yang bersih dan adil. Sebaliknya apabila wewenang yang dipundaknya disalahgunakan maka rakyat akan melakukan banyak tindakan atas penyalahgunaan wewenang tersebut lewat cara apapun, seperti yang terjadi pada pemerintahan orde baru. (Fatah, 2000).

Kecenderungan sarjana politik sepakat bahwa pemilu merupakan kriteria penting untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Hampir tidak ada sistem politik yang bersedia menerima cap tidak demokratis, dan kebanyakan sistem politik menjalankan proses Pemilu, kecuali sejumlah negara seperti Brunei Darussalam dan sejumlah negara monarki di Timur Tengah. Bahkan sistem politik Komunis, sebelum mereka runtuh juga mengadakan Pemilu, sekalipun lebih merupakan formalitas politik.

Pemilihan umum di Indonesia dimaksudkan sebagai suatu proses demokratisasi berupa pemilihan yang dilakukan oleh semua warga negara yang telah memiliki hak pilih baik untuk dipilih maupun memilih. Hakikat pemilihan umum yang sesungguhnya ialah sebagai hak setiap warga negara, bukan merupakan sebuah kewajiban yang mesti dilakukan. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merujuk pada Undang-undang No 12 Tahun 2003 sedangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia tahun 2004 berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2003 (Sembiring, 2006: 72-128, 243-285), sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pemilu kali ini, rakyat memberikan dukungan suaranya langsung kepada calon-calon legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sistem pemilihan langsung ini terbukti dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat dan berjalan relatif cukup baik.

Merujuk pada Budiarto (1996), sistem pemilihan umum yang telah dilaksanakan di Indonesia tahun 2004 terkategori sebagai pemilu dengan teknis sistem perwakilan berimbang. Gagasan pokok dari sistem ini bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini, ditentukan suatu perimbangan, misalnya 1:400.000 yang berarti sejumlah pemilih tertentu mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Sistem perwakilan berimbang sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain dengan sistem daftar (*list system*). Dalam sistem daftar setiap partai mengajukan satu daftar calon dan si pemilih memilih salah satu daftar darinya dan dengan demikian memilih satu partai dengan semua calon yang diajukan oleh partai itu untuk bermacam-macam kursi yang sedang diperebutkan. Pemilihan umum merupakan pengejawantahan demokrasi. Menurut penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO tahun 1949, demokrasi merupakan sebuah nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.

Makna Pemilihan Umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan (pengaruh) yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elit politik (pergantian kekuasaan) dapat dilakukan secara damai dan beradab. (J. Kristiadi, 2004: 15).

Dalam pelaksanaan pemilu calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2004 di Indonesia, kekuasaan merupakan kata yang paling utama. Merujuk pada Budiarto (1996), kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Bagi mayoritas orang, kekuasaan merupakan suatu nilai yang ingin dimiliki. Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial.

Kekuasaan sosial menurut Fletcheim (1952) adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan pihak lain. McIver memberikan definisi bahwa kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan. Maksud hubungan di sini adalah terdapatnya satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah; satu pihak memberi perintah, satu pihak mematuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu ada satu pihak yang lebih tinggi kedudukannya dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan. Paksaan tidak selalu perlu dipakai secara gamblang, tetapi adanya kemungkinan paksaan itu dipakai (Budiarto, 1996). Bentuk paksaan yang terjadi pada pemilu yang lalu sering tersiratkan dalam kampanye para calon presiden-calon wakil presiden.

Pemilihan Umum tahun 2004 sebagai peristiwa politik sangat mempengaruhi kondisi dan kestabilan dalam masyarakat. Belajar dari Pemilu-

pemilu sebelumnya di mana rasa aman masyarakat kurang mendapatkan perhatian dari penyelenggara dan peserta Pemilu. Diabaikannya rasa aman menyebabkan Pemilu sebagai pesta demokrasi menjenghkan bahkan tidak menarik masyarakat terlibat di dalamnya. Masyarakat walaupun memberikan suaranya namun tidak dengan antusiasme tinggi sebagai bentuk partisipasi politik, hanya merupakan keharusan dan rasa *ewuh pakewuh* terhadap aparat pemerintah. Agar Pemilu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, menurut Mujiran (2004: 111) ada dua aspek yang perlu diperhatikan. *Pertama* adalah proses yang aman semenjak kampanye hingga Pemilu, tidak ada upaya-upaya memaksakan kehendak, penggunaan otot dan penggalangan massa sehingga kegiatan Pemilu ternoda oleh tindak kekerasan. Menciptakan kampanye hingga Pemilu yang aman memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi penuh di dalamnya. Sebagai ajang perebutan pengaruh dan dukungan, rangkaian kampanye dapat rawan konflik. Karena itu, menciptakan kampanye dan Pemilu aman selain menjawab kebutuhan masyarakat juga menciptakan kepada masyarakat terhadap pemilu. *Kedua*, selain proses hasilnya dari pemilihan umum benar-benar mampu membangun rasa aman masyarakat sehingga dunia usaha, pemulihan krisis, serta berbagai agenda reformasi tertunda dapat dijalankan. Salah satu kelemahan sistem politik Indonesia adalah ketidakmampuan membangun sistem politik di mana rakyat benar-benar merasakan rasa aman yang sesungguhnya.

Seiring dengan tuntutan perbaikan pemerintahan, di Indonesia saat ini tengah berhembus isu ditegakkannya prinsip-prinsip *good governance*. Seyogyanya partisipasi politik rakyat menjadi lebih hidup dan dinamis, tidak terkecuali bagi masyarakat miskin. Partisipasi politik rakyat sesungguhnya telah menjadi fokus kajian para Antropolog terutama di Asia Tenggara. Moore (1999) menyatakan bahwa hierarki dualisme seperti modern/tidak modern, religius/sekular adalah hal yang terdapat di negara-negara Asia Tenggara. Oleh karenanya terjadi sebuah sikap yang ambivalen dalam proses pengambilan keputusan politik oleh rakyat, yaitu antara konservatif dan modern. Pada masyarakat miskin perkotaan, sehubungan rendahnya pendidikan mereka maka dalam partisipasi politiknya dapat diduga terkategori menganut paham konservatif, yaitu memilih calon yang lebih dikenal walaupun tidak memiliki program yang mumpuni. Hal tersebut juga dikarenakan sifat mental masyarakat miskin yang fatalistik, umumnya menganggap bahwa siapapun juga pemimpin negara Indonesia, tidak akan membawa kemajuan bagi mereka (Yusar, 2004).

2.1.5. Partisipasi Politik

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Jadi partisipasi politik merupakan suatu pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. (Budiardjo, 1982: 2)

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pelibatan proses politik, misalnya, kampanye dan pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh

keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit-banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat. Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan-kegiatan mereka mempunyai efek, dan ini dinamakan *political efficacy*.

Dalam negara-negara demokratis umumnya muncul anggapan bahwa lebih banyak partisipasi politik lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Apabila kurang banyak pendapat dikemukakan, pimpinan negara akan kurang tangap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung untuk melayani kepentingan beberapa kelompok masyarakat saja.

Pengamat masyarakat demokratis Barat juga cenderung berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun. Termasuk dalam kelompok ini sarjana-sarjana seperti Herbert Mc Closky, Gabriel Almond, Norman H Nie dan Sidney Verba. Mereka yang banyak mempelajari negara yang sedang berkembang, cenderung untuk berpendapat bahwa kegiatan yang tidak sukarela pun tercakup, karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan-kegiatan yang benar-benar sukarela dan kegiatan yang dipaksakan secara terselubung, baik oleh penguasa maupun kelompok lain. Nelson berpendapat demikian dan selanjutnya membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*) (Nie dan Verba. 1972: 2).

Dalam pelaksanaan kegiatan partisipasi bentuk apapun, termasuk partisipasi politik ada unsur tekanan atau manipulasi, akan tetapi di negara demokrasi Barat tekanan semacam ini jauh lebih sedikit dibanding dengan negara-negara komunis, biasanya terjadi di negara yang kepala negaranya otoriter dalam kepemimpinannya. Di negara-negara berkembang, yang dalam banyak hal berada di antara dua kelompok negara ini, terdapat berbagai nuansa kombinasi dan sukarela dan unsur manipulasi.

Pada umumnya partisipasi politik mencakup kegiatan yang bersifat positif, akan tetapi ada juga sarjana, seperti halnya Huntington dan Nelson, yang menganggap bahwa kegiatan yang unsur destruktifnya seperti demonstrasi, teror, pembunuhan politik dan lain-lain dapat merupakan suatu bentuk partisipasi. Nie dan Verba tidak mau memasuki masalah rumit ini, akan tetapi membatasi penelitian mereka pada tindakan-tindakan yang bersifat legal (Nie dan Verba. 1975: 3).

Di samping mereka yang ikut serta dalam satu atau lebih bentuk partisipasi, ada warga negara masyarakat yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. hal ini adalah kebalikan dari partisipasi dan disebut apatis (*apathy*). Timbul pertanyaan: mengapa orang apatis? Mc Closky (1972: 255, 263)

berpendapat bahwa ada yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan yang tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai masalah politik. ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan (mungkin lingkungan minoritas) di mana ketidak-ikutsertaan merupakan hal yang terpuji. Tidak semua menganggap apatis sebagai masalah yang harus dirisaukan. Mc Closky mengemukakan bahwa sikap acuh tak acuh oleh beberapa sarjana malah dilihat sebagai hal yang positif karena memberi fleksibilitas kepada sistem politik, dibanding dengan masyarakat yang warga negaranya terlalu “aktif” sehingga menjurus ke pertikaian yang berlebihan, fragmentasi dan instabilitas. Mungkin saja orang tidak ikut memilih dalam pemilihan umum, karena berpendapat bahwa keadaan yang tidak terlalu buruk dan dia percaya bahwa siapa pun yang akan dipilih tidak dapat merubah keadaan itu, sehingga tidak merasa perlu untuk memanfaatkan hak pilihnya. Apatis dalam hal ini tidak menunjuk kepada rasa kecewa, atau frustrasi, tetapi malah sekedar kepuasan dan kepercayaan kepada sistem politik yang ada.

Dalam hubungan ini, Seymour Martin Lipset (dalam Budiardjo, 1982: 5) secara hati-hati mengemukakan pendapat bahwa sekurang-kurangnya di negara-negara demokrasi Barat, gejala tidak memberikan suara dapat diartikan sebagai mencerminkan stabilitas dari sistem politik yang bersangkutan. Galen A Irwan (1975: 35) menyimpulkan bahwa beberapa keadaan tertentu, perasaan puas menyebabkan partisipasi yang lebih rendah. Tetapi umumnya sependapat bahwa yang penting adalah meneliti sebab mengapa seseorang tidak itu memberikan suaranya.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam bentuk intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan, jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, besar sekali. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan dari partai atau kelompok kepentingan. Gambar piramida berikut menunjukkan partisipasi politik masyarakat.

Gambar 1: Piramida Partisipasi Politik
Sumber: Roth dan Wilson, (1976; 159)



Ada yang menyamakan dua jenis gejala ini dengan piramida yang basisnya lebar, tetapi menyempit ke atas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik. Di antara basis dan puncak terdapat berbagai kegiatan yang berbeda-beda intensitasnya; berbeda menurut intensitas kegiatan maupun mengenai bobot komitmen dari orang yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya (mulai dari kegiatan yang kurang intensif): memberi suara dalam pemilihan umum, membaca secara teratur berita politik dalam surat kabar, menghadiri rapat yang bersifat politik, menjadi kelompok kepentingan atau anggota partai, melibatkan diri dalam proyek pekerjaan sosial, *contacting* pejabat-pejabat dan bekerja aktif sebagai kelompok kepentingan atau partai politik. Kegiatan yang lebih intensif lagi adalah melibatkan diri dalam kampanye pemilihan, dan paling intensif, sebagai pimpinan partai atau kelompok kepentingan.

Suatu bentuk partisipasi yang agak mudah dan diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui presentasi orang yang memilih dibanding dengan jumlah warga negara yang berhak memilih. Memberikan suara dalam pemilihan tidak merupakan satu-satunya bentuk partisipasi, lagi pula angka hasil pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang sangat kasar mengenai partisipasi. Masih terdapat pelbagai bentuk partisipasi lain yang berjalan secara kontinu dan tidak terbatas pada masa pemilihan umum saja. Penelitian mengenai kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa presentase partisipasi dalam pemilihan dalam kegiatan yang tidak menyangkut pemberian suara semata-mata. Maka dari itu, untuk mengukur tingkat partisipasi perlu diteliti pelbagai kegiatan politik.

Dalam penelitian mengenai partisipasi berjudul *civic culture*, yang diselenggarakan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba (1965:160) menemukan beberapa hal yang menarik. Beberapa warga negara Eropa Barat, tidak terlalu bergairah memberikan suara dalam pemilihan umum, akan tetapi mereka lebih aktif berpartisipasi untuk mencari pemecahan bermacam-macam masalah masyarakat dan lingkungannya melalui kegiatan lain, dibanding dengan warga negara di negara lain. Ada juga warga negara yang lebih cenderung untuk

menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi seperti misalnya organisasi politik, bisnis, profesi, petani dan sebagainya daripada rekannya di negara-negara lainnya.

Suatu penelitian menemukan bahwa dari sejumlah orang Amerika yang diteliti 22% sama sekali tidak aktif dalam kehidupan politik, memberikan suara dalam pemilihan umum pun tidak. Kelompok ini terdiri dari tingkat sosial ekonomi yang rendah, banyak orang kulit hitam, wanita, orang tua (di atas 55 tahun) dan orang muda (di bawah 35 tahun). Selanjutnya ditemukan bahwa 21% (yang disebut “spesialis pemilih”) hanya aktif dalam memberikan suara, tetapi tidak mengadakan kegiatan politik lainnya. Mereka juga banyak terdiri dari golongan sosial ekonomi yang rendah, orang kota dan orang berumur, sedangkan orang daerah pedesaan kurang terwakili. Di samping itu ada dua golongan yang aktif, yaitu satu kelompok yang mencapai persentase 15%, selalu memberikan suara dalam pemilihan dan aktif dalam kampanye pemilihan. Mereka disebut “aktivis kampanye” dan terdiri dari golongan atas, berasal dari kota besar dan kota satelit. Banyak orang kulit hitam dan Katolik termasuk di dalamnya (Nie dan Verba, 1975:118-119). Golongan yang dinamakan “aktivis lengkap”, yaitu yang benar-benar aktivis dalam arti aktif melakukan segala macam kegiatan politik termasuk kampanye, menjadi pimpinan partai sepenuh waktu dan sebagainya, hanya mencapai 11%. Mereka ini kebanyakan berasal dari golongan sosial ekonomi atas, sedangkan orang tua dan golongan muda kurang terwakili.

Disadari bahwa mengikutsertakan masa rakyat dalam kegiatan pembangunan adalah sangat penting dalam rangka memperoleh dukungan bagi rezim dan mengembangkan rasa bangga dan loyalitas pada negara. Terutama partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dianggap dapat mempertebal keterlibatannya dalam usaha pembangunan masyarakat ke arah masyarakat yang lebih baik, jadi mempunyai aspek psikologis yang kuat. Sekaligus presentase yang tinggi dapat memperkuat keabsahan rezimnya di mata dunia.

Di beberapa negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, sangat terbatas malahan mendekati apatis. Memang di negara demokratis Barat tingkat partisipasi yang rendah atau apatis sekali pun, sebagai tanda kepuasan, akan tetapi di negara-negara berkembang tidak demikian halnya. Di negara yang rakyatnya apatis, pemerintah menghadapi masalah bagaimana meningkatkan partisipasi itu. Di beberapa negara yang proses pembangunannya berjalan dengan lancar, masalahnya lain lagi. Di situ perluasan urbanisasi serta jaringan pendidikan dan meningkatnya komunikasi massa menggerakkan banyak kelompok yang tadinya apatis untuk aktif turut serta dalam proses politik melalui kegiatan dalam bermacam-macam organisasi seperti serikat buruh, organisasi tani, wanita, pemuda, partai politik dan sebagainya, kelompok-kelompok ini tergugah kesadaran sosial dan politiknya dan terjadilah peningkatan ungkapan aspirasi dan tuntutan-tuntutan secara menyolok. Hal ini dapat menimbulkan gejolak sosial dan jika keadaan ini berlangsung lama dapat menjurus ke anomi, yaitu keadaan di mana norma-norma sosial jatuh, sedangkan nilai-nilai baru yang akan menggantikannya belum terbentuk. Kesenjangan antara tujuan sosial dan cara untuk mencapai tujuan itu menimbulkan ekstrem, seperti teror dan sebagainya. Hal ini sangat berbahaya dalam suatu negara di mana,

seperti kebanyakan negara berkembang, kemiskinan dan pengangguran merajalela, di mana terdapat ketimpangan dalam pembagian pendapatan dan komitmen terhadap pemerintah kurang mantap. Oleh karena itu ada pendapat bahwa pembangunan yang cepat dan ikut sertanya banyak kelompok baru dalam politik dalam waktu yang singkat, dapat mengganggu stabilitas (Huntington. 1968:4).

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih presiden-wakil presiden atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik rakyat selalu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Isaacs (1993) identitas kelompok. Di analogikan dengan kekuatan politik etnis, kaum miskin memiliki sebuah fungsi atas identitas kelompok dasar, hal tersebut merupakan kenyataan bahwa sindrom “kita” dan “mereka” telah terbentuk di dalamnya. Karena itu akan terbentuk sebuah kebebasan politik yang relatif atau bahkan ketidakleluasaan yang ditekankan oleh rasa permusuhan tergantung pada kuatnya sistem kekuasaan, yaitu tergantung pada siapa yang memerintah atau bagaimana sistem pemerintahan tersebut. Proses pembangunan, terutama dalam negara yang berhadapan dengan masalah kemiskinan dan sumber daya yang langka, akan selalu dibarengi dengan gejolak-gejolak sosial. Keresahan-keresahan ini akan mewarnai kehidupan politik di negara-negara berkembang dan menjadikannya penuh dinamika. Kalaupun stabilitas berhasil dicapai, maka sifatnya mungkin akan lebih instabil daripada negara-negara yang sudah mantap kehidupan politiknya.

Menurut Myron Weiner (dalam Syarbaini, dkk, 2002: 69) terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- 2) Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- 3) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- 4) Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antarelite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- 5) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

MASYARAKAT PERKOTAAN DAN PEMILU PRESIDEN

3.1. Pemukiman Masyarakat Miskin Jamika

Kelurahan Jamika jauh dari homogen, baik dalam penampakan fisiknya maupun komposisi sosial penduduknya. Pemandangan yang mencolok dan langsung membedakannya dari tempat lainnya adalah kondisi perumahannya. Rumah kalau diamati dibangun secara asal-asalan dan berjejal-jejalan satu sama lain, lorong di sela-selanya selalu penuh orang karena ruang di dalam terlalu sempit. Pemukiman penduduk Jamika mayoritas tidak teratur, dan nampak kekumuhan, terutama RW 3, RW 5 dan RW 11, walaupun RW-RW yang tidak jauh berbeda sedikit lebih baik yaitu di RW 4 dan RW 7.



Gambar 1
Salah satu rumah warga Jamika

Rumah di atas merupakan salah satu rumah tempat tinggal warga di RW 3 Kelurahan Jamika di sebelah utara jalan Pagarsih dan jalan yang menuju rumah ini merupakan sebuah lorong gang yang sempit. Rumah yang dibangun sangat sederhana terbuat dari papan dan bilik itu berada kira-kira ditengah pemukiman penduduk di RW 3. Rumah itu sengaja disekat-sekat menjadi kamar-kamar untuk dikontrakan, di dalamnya tinggal beberapa kepala keluarga dan anak-anaknya, pekerjaan penghuninya ada pedagang, penjaga toko, buruh dan lain-lain, mereka kebanyakan bekerja disektor informal. Rumah itu menggambarkan pemandangan ketidakteraturan dan kondisi kumuh, sebuah bangunan rumah yang jauh dar kriteria kelayakan sebuah tempat tinggal bagi suatu keluarga. Keadaan ini tidak dapat mereka hindari, mereka suka atau tidak suka harus tinggal ditempat seperti itu, karena ketidakmampuan penghasilan ekonomi keluarganya.



Gambar 2
Salah satu rumah warga di Jamika

Gambar di atas merupakan bagian dalam salah satu warga di RT 07 RW 09, luas bangunan 3 x 4 M², dinding dan atap rumah terbuat dari bilik bambu dengan jumlah penghuninya 3 orang, pemiliknya seorang ibu-ibu dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Bagian tengah rumah digunakan untuk tempat tidur, dapur dan untuk menerima tamu, keadaan di atas jauh dari tempat tinggal yang layak dan mengindikasikan rendahnya penghasilan ekonomi sehingga kurang mampu untuk membangun atau mengontrak rumah yang lebih nyaman. Kondisi seperti di atas dapat kita temui di beberapa pemukiman penduduk yang lainnya, yang memang penghasilan ekonomi keluarganya belum dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang lebih layak dalam berbagai aspek.

3.2. Pekerjaan Masyarakat

Mayoritas penduduk Kelurahan Jamika memperoleh pekerjaan di bidang yang disebut “sektor informal”, tetapi pengamatan lebih dekat segera menunjukkan bahwa pemisahan ketat antara sektor ekonomi formal dan informal tidak mungkin dilakukan. Pegawai negeri kadang-kadang mempunyai pekerjaan “informal” sampingan; istri mereka seringkali terlibat dalam perdagangan kecil-kecilan yang penghasilannya lebih besar daripada gaji suami. Mereka berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, kadang-kadang bekerja di sebuah pabrik (“formal”), kemudian beralih menjadi pedagang kecil atau bekerja musiman sebagai buruh bangunan (“informal”), dan kembali, jika memungkinkan, ke pekerjaan lain di pabrik.

Pekerjaan pokok warga Jamika yaitu pekerjaan yang menyita kebanyakan waktu dan tenaga mereka, dalam data monografi kelurahan disektor wiraswasta merupakan angka tertinggi yaitu 4.062 orang dibanding dengan sektor yang lain, seperti pegawai swasta berjumlah 1.636 orang, pegawai negeri sipil berjumlah 915 orang, pertukangan berjumlah 159, jasa berjumlah 61 orang. Ada banyak pengangguran tak kentara yang tidak tergambarkan dalam angka-angka ini. Seorang buruh mingguan (yang menganggur yang dua atau tiga minggu) diklasifikasikan sebagai “pekerja lain”. Mereka yang diklasifikasikan sebagai “penganggur” adalah mereka yang tidak bekerja sama sekali selama lebih dari dua

bulan. Banyak di antara mereka yang diklasifikasikan sebagai ibu rumah tangga mempunyai pekerjaan sampingan kecil-kecilan, seperti menjahit pakaian untuk pelanggan nonrumah tangga; Tetapi jika pekerjaan ini menyita banyak waktu mereka, maka mereka dikategorikan sebagai pekerja di bidang jasa. Laki-laki penganggur pada umumnya menolak pekerjaan rumah tangga, meskipun istri mereka memiliki pekerjaan penuh waktu di luar rumah tangga.

Data yang diperoleh dari monografi kelurahan menunjukkan bahwa jumlah usia produktif 12.463 jiwa atau 49,1 % sedangkan usia tidak produktif 12.895 jiwa atau 50,8 % dari jumlah penduduk. Pengangguran berjumlah 3.783 jiwa atau 30 % dari usia produktif sedangkan jumlah pekerja 8.680 jiwa atau 69 % dari usia produktif. Melihat data usia produktif dan tidak produktif menunjukkan adanya keseimbangan dan kalau dilihat dari beban yang ditanggung oleh pekerja berjumlah 2 jiwa dari jumlah penduduk, hal ini menunjukkan tidak begitu berat beban yang ditanggung. Namun menurut Pa Dede yang berasal dari RW 5³, ketika melihat sektor lain misalnya mata pencaharian yang diperoleh nampaknya cukup berat kalau harus memenuhi kebutuhan makan, kesehatan, pendidikan, kontrakan rumah atau kamar dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya, dengan penghasilan tiap pekerja perharinya kurang lebih sekitar Rp 20.000 – Rp 30.000. Walaupun ada upaya pemerintah melalui program-program pengentasan kemiskinan atau jaringan pengamanan sosial namun upaya itu tidak mampu berbuat banyak pada orang-orang kecil untuk dapat keluar dari kemiskinan, seperti pemberian modal usaha kecil ataupun yang lainnya. Program itu tidak begitu lama dapat bertahan apalagi berkembang kenyataan yang terjadi program itu menghilang tanpa kabar beritanya.

Pedagang-pedagang yang berjualan di daerah pemukiman warga Jamika, banyak yang membuka warung-warung kecil, ada yang berkeliling di Jamika dan ada yang ke luar Jamika. Pedagang atau warung pada gambar di atas banyak ditemui di tengah-tengah pemukiman penduduk warga Kelurahan Jamika, mereka berdagang di depan gang kontraknya, atau ada juga yang berkeliling di Jamika ataupun keluar dari Jamika. Penghasilan dari berjualannya tidak menentu keuntungannya, kadang untung kadang tidak untung. Keuntungan dari berdagangnya kebanyakan hanya bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Pendapatan kebanyakan penduduk Jamika tidak mengalami peningkatan secepat lonjakan biaya hidup yang mesti ditanggung, atau bahkan menurun, sehingga semakin banyak keluarga yang terus terpuruk dalam kemiskinan yang semakin parah. Industri tekstil di Bandung dan sekitarnya yang pernah menjadi tampungan para pekerja mengalami restrukturisasi bahkan pada tahun 1997 ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada awalnya dan menjadi multi krisis membuat industri-industri tekstil bangkrut atau paling tidak mengurangi jumlah pegawainya. Pekerja-pekerja lain umumnya harus menemukan pekerjaan disektor-sektor informal, karena ketiadaan koneksi, sehingga hampir tidak mungkin memperoleh pekerjaan di sektor formal. Hanya sejumlah kecil orang yang memperoleh pekerjaan di sektor formal yang setiap Rukun Tetangga bisa dihitung dengan jari. Sektor informal mempunyai daya serap yang lebih tinggi, namun

³ Wawancara, Rabu 26 Juli 2006

secara keseluruhan hasilnya sangat rendah; dengan jam kerja yang panjang, namun penghasilannya seringkali tidak seberapa. Meskipun demikian, beberapa lapangan pekerjaan di sektor informal sangat menarik karena memberi penghasilan yang tinggi, walaupun jumlahnya tidak banyak. Keberhasilan penjual makanan sangat tergantung pada apakah dia berhasil mendapatkan tempat yang aman dan tepat untuk berjualan atau, apakah dia berdagang berkeliling melewati tempat-tempat strategis dan menjanjikan banyak pembeli. Dalam hal ini, pedagang umumnya juga memerlukan bantuan orang lain dan menjalin hubungan ketergantungan. Mereka yang kurang beruntung hanya akan menunggu dagangannya atau berjalan keliling dengan hasil penjualan yang tidak menentu.

Pemerintah Kota Bandung cukup membatasi ruang gerak para pedagang keliling, pedagang yang mangkal di jalan-jalan dilarang berjualan, sedangkan tukang becak dilarang melewati jalan-jalan utama. Banyak tempat sibuk di kota yang menjanjikan daya beli yang tinggi dan sangat banyak pengunjung kini berubah menjadi daerah terlarang bagi mereka. Peneliti menyaksikan langsung bagaimana pasukan polisi khusus ditugasi mengawasi keberlakuan peraturan ini, dan menyita becak dan pikulan, gerobak kakilima diangkut dalam mobil satuan pamongpraja yang tertangkap basah melewati atau berjualan ditempat-tempat yang dilarang pemerintah. Pembatasan ruang gerak ini memperparah kemerosotan ekonomi kawasan yang secara umum memang sudah parah. Perdagangan merosot jauh, dan karena persaingan keras kebanyakan pedagang harus pasrah diri dengan tingkat keuntungan yang semakin kecil. Kemerosotan yang sama juga dirasakan pada sektor-sektor lainnya.

Kemiskinan sebagian masyarakat Jamika merupakan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural terjadi bukan dikarenakan “ketidakmauan” si miskin untuk bekerja (malas) melainkan karena “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan bagi si miskin bekerja, sedangkan kemiskinan kultural merupakan faktor-faktor penghambat atau merintang yang datang dari diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. (Suharto, 2005: 135). Kemiskinan struktural dilihat dari kondisi pemukiman penduduk memang terbentuk pada golongan miskin. Pemukiman yang jauh dari kelayakan sebagai tempat tinggal, baik kesehatan maupun jumlah jiwa yang menetap dalam sebuah kontrakan dihuni melebihi kapasitas ideal, program-program pengentasan kemiskinan baik dari pemerintah maupun lembaga di luar pemerintah tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan nasib mereka. Peraturan-peraturan resmi yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan kultural, bersumber pada pendidikan sebagian masyarakat Jamika yang mayoritas hanya lulusan SD dan SMP dan banyaknya juga yang tidak sekolah. Hal ini tentunya akan menimbulkan keterbatasan akses sumberdaya, dan adanya hambatan budaya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Oscar Lewis yaitu adanya budaya kemiskinan.

Kemiskinan sebagian masyarakat Jamika, tidak berlaku seragam pada seluruh sektor informal, dan tidak seragam pula untuk seluruh warga Jamika. RW 2, RW 3, RW 5, RW 8, RW 9 dan RW 11 adalah kawasan di Jamika yang

mengalami kemerosotan ekonomi, namun keadaan demikian itu tidak mewakili keseluruhan warga Jamika. Tempat-tempat ini merupakan beberapa bagian dari lingkungan yang melalui proses seleksi alam, menjadi tempat tinggal mereka yang gagal. Mereka yang lebih beruntung, cepat atau lambat akan berpindah ke tempat lain; sementara banyak orang yang gagal di tempat lain akhirnya akan terlempar ke tempat ini. Sejarah kehidupan yang mengalami kegagalan cukup lama memunculkan, sikap hidup mereka yang diwarnai oleh kurangnya rasa harga diri, fatalisme dan apatis. Sikap-sikap ini diimbangi dengan sikap-sikap lain yang positif, seperti masih adanya keinginan untuk mengatasi kesulitan hidup dan ambisi.

3.3. Partisipasi Politik Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

Pemilu 2004 berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Ada beberapa kesulitan berkaitan dengan mekanisme pemberian suara dalam pemilu 2004. Misalnya saja, soal cara mencoblos yang harus mencoblos nomor, nama dan gambar. belum lagi jumlah kontestan peserta pemilu yang jauh lebih banyak dari yang sudah-sudah. Sama halnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pelipatan kertas yang cukup besar, ada kasus di beberapa daerah yang banyak coblosannya tidak syah, karena coblosannya mengenai calon presiden yang lainnya, hal ini disebabkan lipatan kertas suara tidak dibuka semua. Pemilu mendatang mungkin jumlah parpol peserta pemilu semakin bertambah dan calon presiden juga bertambah sehingga diperlukan lembaran kertas suara yang tebal. Kalangan lansia yang kepekaan panca inderanya mulai berkurang dan pemula yang baru pertama kali ikut memilih tentu jauh lebih sulit dalam menentukan pilihan.

Pemilu untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Daerah diselenggarakan pada 5 April 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibagi menjadi dua tahapan tahapan pertama pada 5 Juli 2004 dan tahapan dua pada 21 September 2004. Pada putaran pertama di ikuti oleh lima pasang calon presiden dan wakil presiden, kelima pasang itu berdasarkan hasil undian nomor urut yaitu: 1) Wiranto berpasangan dengan Solahudin Wahid yang dicalonkan oleh Partai Golongan Karya, 2) Megawai berpasangan dengan Hasim Muzadi yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 3) Amin Rais berpasangan dengan Siswono Yudohusodo yang dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional, 4) Susilo Bambang Yudoyono berpasangan dengan Yusuf Kalla dicalonkan oleh Partai Demokrat dan 5) Hamzah Haz berpasangan dengan Agung Gumelar dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (Santosa dan Salam, 2004: 49-92). Sedangkan yang berhasil masuk pada putaran ke dua adalah pasangan Megawati-Hasim Muzadi dan Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla dan yang berhasil terpilih menjadi presiden adalah Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan, warga Jamika mengenal dan tahu terhadap kelima figur pasang calon presiden hanya melalui media cetak, elektronik, dan dari tim-tim suksesnya, namun secara detail siapa ke lima pasang calon itu mereka tidak mengetahuinya. Mereka mengenal calon hanya berdasarkan fisik dan jabatan strategis di pentas nasional

yang pernah dialami oleh kelima calon presiden. Menurut Harun⁴ salah satu warga RW 3, tahunya riwayat hidup beberapa figur calon presiden dari tim-tim sukses presiden. Namun, menurut Harun tidak begitu tahu bagaimana karier politiknya, prilakunya dan tidak tahu juga apakah calon-calon presiden mampu memimpin bangsa Indonesia dengan baik, sehingga rakyat Indonesia nasibnya menjadi lebih baik dari sebelumnya yaitu menjadi sejahtera dan maju. Program-program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing calon presiden semuanya begitu menjanjikan, namun menurut Muntasir⁵ mayoritas pemilih tidak mengetahui bagaimana penerjemahan yang lebih kongkrit dari program-program yang ditawarkan, yang tahu mungkin hanya sebagian kecil saja.

Masyarakat Jamika berharap presiden yang terpilih akan membawa perubahan terhadap nasib mereka dan lebih luasnya negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Terutama perubahan keadaan ekonomi masyarakat untuk lebih sejahtera, karena keadaan ekonomi masyarakat sejak mulai krisis tahun 1997 sampai dengan sekarang dalam keadaan terpuruk, serta janji-janji yang disampaikan oleh calon presiden dan wakil presiden pada waktu kampanye betul-betul dapat dibuktikan. Namun, dibalik harapan-harapan itu, dalam diri mereka pun ada kekhawatiran, seperti yang diungkapkan ibu rumah tangga warga RW 8 Ibu Erni Sri Rahayu⁶ menurutnya siapapun presiden yang terpilih akan begini-begini saja atau seperti dulu-dulu lagi.

Peristiwa pemilu sebagai momentum perhelatan demokrasi karena pada saat itulah rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan masa depannya sendiri dengan memilih wakil rakyat, presiden dan wakil presiden. Pemilu menjadi sangat istimewa bagi rakyat karena rakyat memperoleh kesempatan berpartisipasi nyata dalam kehidupan bangsa dan negara. Jika dalam aktivitas keseharian kurang punya peran menentukan masa depan negara, peristiwa pemilu merupakan undangan rakyat untuk terlibat dan berpartisipasi secara nyata. Rakyat menyambut perhelatan pemilu dengan berbagai pandangan, ada yang bergembira dan ada yang biasa-biasa saja. Tidaklah berlebihan manakala dalam momentum lima tahun rakyat benar-benar diberikan kesempatan mempergunakan hak pilihnya dengan sungguh-sungguh karena terpilihnya wakil rakyat, presiden dan wakil presiden yang kredibel menjamin kelangsungan hidup bersama sebagai rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan informasi dari Pa Suherman warga RW 7⁷ pada masa menjelang Pemilu 2004 sempat terjadi kegoncangan dan tersebar isu di masyarakat Jamika wacana golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak pilihnya, wacana itu berasal dari komunitas-komunitas tertentu yang tidak percaya kepada lima pasang calon presiden dan wakil presiden.

Bentuk partisipasi politik masyarakat Jamika dalam penelitian ini akan di fokuskan kepada pelibatan dalam memberikan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004, karena masih banyak bentuk-bentuk partisipasi politik yang lain yang tidak menyangkut pemberian suara semata-mata.

⁴ Wawancara, Kamis 16 Agustus 2006

⁵ Wawancara, Senin 21 Agustus 2006

⁶ Wawancara, Senin 21 Agustus 2006

⁷ Wawancara, Senin 21 Agustus 2006

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Suara dan TPS Pada Putaran ke satu, 5 Juli 2004

No	Uraian	Rekapitulasi Jumlah Pemilih		
		3		
1	2	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPS	8.300	8.479	16.779
2.	Jumlah Pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPS	995	842	1.837
3.	Jumlah Pemilih dari TPS lain di wilayah PPS	210	110	320
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (1+2+3)	9.505	9.431	18.936
5.	Jumlah TPS dalam wilayah PPS	68		

Sumber: PPS Kelurahan Jamika 2004

Berasarkan tabel di atas, dari jumlah pemilih terdaftar pada putaran pertama 18.936 yang menggunakan hak pilihnya 16.779 dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 1.837.

Tabel 1. 2
Rekapitulasi Jumlah Suara dan TPS Pada Putaran ke dua, 21 September 2004

No	Uraian	Rekapitulasi Jumlah Pemilih		
		3		
1	2	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPS	8.112	8.207	16.319
2.	Jumlah Pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPS	974	738	1.712
3.	Jumlah Pemilih dari TPS lain di wilayah PPS	270	132	402
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (1+2+3)	9.356	9.077	18.433
5.	Jumlah TPS dalam wilayah PPS	68		

Sumber: PPS Kelurahan Jamika 2004

Putaran ke dua jumlah pemilih terdaftar 18.433 yang menggunakan hak pilihnya 16.319 dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 1.712, kalau dipersentasikan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 pada putaran pertama dan putaran kedua sekitar 10 % masyarakat Jamika yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian partisipasi politik masyarakat Jamika antara putaran pertama dan putaran kedua tidak mengalami perubahan yang cukup berarti.

Jumlah pemilih yang tidak memberikan suara sekitar 10%, mencirikan partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat Jamika terhadap penyelenggaraan pemilihan umum sebagai media demokrasi, serta kepercayaan terhadap masing-masing calon presiden dan wakil presiden masih cukup baik. Namun, jumlah 10 % yang tidak menggunakan hak suaranya kalau dibiarkan mungkin pada pemilu mendatang akan bertambah. Untuk itu, perlu diketahui alasan-alasan mereka tidak

memberikan suaranya, agar pada pemilu mendatang dapat memiliki pemahaman yang memadai di kalangan rakyat di satu sisi mengenai siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum, sehingga muncul kesadaran dirinya untuk meningkatkan partisipasi politiknya, karena peristiwa pemilihan umum sangat penting dan akan menentukan perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Data yang diperoleh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) menunjukkan bahwa masyarakat Jamika yang tidak memberikan suara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 di setiap TPS yaitu: 3 TPS yang lebih dari 50 pemilih yang tidak memilih, 2 TPS yang lebih dari 40 pemilih yang tidak memilih, 16 TPS yang lebih dari 30 pemilih yang tidak memilih, 24 TPS yang lebih dari 20 pemilih yang tidak memilih, 21 TPS yang lebih dari 10 pemilih yang tidak memilih, 2 TPS yang lebih dari 1 pemilih yang tidak memilih. Mayoritas yang tidak memberikan suaranya berasal dari beberapa TPS yang berada di RW yang jumlah penduduknya padat, penghasilan ekonominya rendah, dan Pendidikannya juga rendah.

Data dari TPS juga menunjukkan bahwa jumlah yang tidak memberikan suara lebih banyak laki-laki berjumlah 974 dari pada perempuan berjumlah 738, Menurut Ramdan⁸ hal ini disebabkan karena laki-laki kebanyakan bekerja dan bekerjanya disektor informal yaitu berdagang, kalau sempat mereka menggunakan hak suaranya kalau tidak sempat tidak menggunakan hak suara, mereka beranggapan tidak memberikan suara juga tidak berpengaruh terhadap pekerjaannya. Sedangkan perempuan kebanyakan tinggal dirumah bisa menyempatkan untuk memberikan suaranya, mereka berangkat ke TPS bersama tetangganya.

Berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh dari PPS maupun dari warga Jamika, karakteristik sosial masyarakat kelurahan Jamika berdasarkan partisipasi politiknya pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa karakteristik sosial. Partisipasi politik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden warga Jamika di pengaruhi oleh kemapanan sosial, kemapanan akan menciptakan adanya dorongan terhadap bangunan kesadaran yang kuat untuk terlibat dalam proses politik. Kemiskinan sosial, sebaliknya, akan menimbulkan dorongan kesadaran yang lemah dalam pelibatan proses politik. Situasi pun akan mempengaruhi terhadap pelibatan politik, situasi normal baik dalam keamanan maupun normal perekonomian. Rasa aman akan menimbulkan ketenangan dan kenyamanan dalam menyalurkan aspirasi politiknya, normal ekonominya membuat masyarakat tidak diberatkan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga. Aktif dan tidak dalam organisasi, akan mengindikasikan bahwa adanya bangunan yang kuat atau tidak terhadap persoalan-persoalan sosial, walaupun yang berpartisipasi bukan selalu anggota organisasi. Dapat dilihat dari hasil peroleh suara pada TPS-TPS yang ekonomi penduduknya cukup mapan seperti di RW 4 dan RW 7 sedikit jumlahnya yang tidak menggunakan hak pilih.

Masyarakat Jamika menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum bukan ansih didasari oleh kesadaran dalam memberikan haknya sebagai warga

⁸ Wawancara, Jum'at 25 Agustus 2006

negara. Faktor mobilisasi dari masing-masing tim sukses calon presiden dan wakil presiden mengindikasikan cukup kuat pengaruhnya untuk dapat mendorong warga Jamika memberikan suara. Menurut Muntasir Umar⁹ mobilisasi atau penggalangan suara merupakan faktor yang dominan mempengaruhi kuatnya partisipasi politik yaitu memberikan suara pada pemilihan preesiden dan wakil presiden. Akan tetapi, memberikan suara dalam pemilu tidak merupakan satu-satunya bentuk partisipasi, masih terdapat berbagai bentuk partisipasi lain yang berjalan secara kontinyu dan tidak terbatas pada masa pemilihan umum saja. (Budiardjo, 1982: 8). Orang akan lebih dihargai dengan menentukan pilihan ketimbang tidak menentukan pilihan sama sekali. Disadari, bahwa semua jenis pilihan mengandung resiko dan konsekuensi apa pun bentuk dan jenis pilihan itu, memberikan suaranya jauh lebih terhormat karena partisipasi sebagai warga negara merupakan bentuk keterlibatan politik. Melalui pemilihan umum rakyat mempercayakan aspirasi bahkan nasibnya kepada calon presiden yang dipilihnya dalam pemilu. Dengan kepasrahan rakyat dalam memberikan aspirasinya, tentunya calon presiden dan wakil presiden tidak menafikan atau menganggap lalu aspirasi yang diberikan.

3.4. Budaya Kemiskinan dan Sikap Politik

Melalui pengamatan dan wawancara dengan informan karakteristik budaya kemiskinan seperti; menerima nasib apa adanya, fatalistik, partisipasinya kecil, keterpinggiran, ketergantungan, kerendahan, kurang dalam mengawasi kekuatan, orientasi kekinian, penulis temukan pada sebagian masyarakat Jamika. Seperti yang diungkapkan oleh Suherman¹⁰ masyarakat mengeluh tentang perekonomian sekarang semakin susah, mereka berdagang namun banyak saingan, keahlian yang lain tidak punya pada akhirnya tergantung pada nasibnya ada rasa keputusasaan karena kehidupan yang lebih baik belum dapat capainya. Walaupun ada harapan akan lebih baik namun sangat kecil. Keuntungan yang diperoleh dari hasil berdagang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik. Ramdan mengatakan bahwa kesadaran untuk berpartisipasi dalam semua aktivitas sosial masih kurang, keadaan ini dapat dilihat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Jamika, jumlah warga yang terlibat hanya sebagian kecil saja. Lain hal-nya dengan partisipasi yang ada nilai jasanya tanpa dimintapun mereka meminta sendiri untuk dapat terlibat. Namun, selanjutnya Ramdan menuturkan bahwa untuk berpartisipasi dalam panitia penyelenggaraan pemilu ditingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) masih cukup baik, hal ini disebabkan karena kuatnya himbuan dari KPU dan pemerintah agar masyarakat turut serta mensukseskan pelaksanaan pemilu, sebab yang lain adanya nilai jasa dari pemerintah terhadap KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara). Dengan jumlah kurang lebih 90 % dari jumlah pemilih yang memberika hak suaranya sudah cukup baik, itupun mayoritas merupakan hasil dari ajakan-ajakan tim sukses para calon presiden dan sosialisasi kampanye yang cukup maksimal.

⁹ Wawancara, Rabu 6 September 2006

¹⁰ Wawancara, Rabu 6 September 2006

Merasa terpinggir, ketergantungan dan kerendahan dapat ditemukan dari ungkapan Dadan¹¹ :

“Abdimah jalmi alit, bodo teu langkung kanupararinter weh sareng pamerintah, nupenting kanggo abdimah supados aya perobihan nasib tarutamana dina persoalan ekonomi, tatangga-tatangga oge sami gaduh emutan sepertos abdi”.

Saya orang kecil, bodoh bagaimana orang-orang yang pintar dan pemerintah, yang penting buat saya ada perubahan nasib terutama persoalan ekonomi, tetangga-tetangga juga punya pemikiran yang sama seperti saya.

Ungkapan di atas yaitu merasa terpinggir, ketergantungan dan kerendahan secara tersirat sering ditemukan dari beberapa informan maupun dari obrolan-obrolan warga diwarung dan para pedagang keliling, seperti pedagang mie baso, baso tahu, kupat tahu, bubur kacang dan pedagang yang lainnya. Mereka juga kurang mengawasi kekuatan atau kurang peduli terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun kumpulan orang yang kegiatannya dapat mengganggu bahkan merugikan mereka, seperti ungkapan dari salah satu warga RW 11 yang tidak mau disebutkan namanya: ”saya tidak begitu memperhatikan kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan kelurahan yang saya pikirkan dan lakukan bagaimana kebutuhan-kebutuhan keluarga setiap hari terpenuhi, atau pun kegiatan kumpulan orang yang kegiatannya mengganggu kenyamanan bahkan merugikan, yang penting tidak mengganggu dan merugikan saya, itukan sudah ada yang menanganinya seperti polisi”. Orientasi kekinian yaitu mereka tidak berpikir jauh kedepan artinya berpikir hanya terbatas pada keadaan saat ini, Erni¹² menuturkan “yang saya pikirkan dan lakukan bagaimana kebutuhan-kebutuhan keluarga seperti kebutuhan dapur, anak dan yang lain bisa terpenuhi, buat apa mikir terlalu jauh kedepan sedangkan untuk cari pekerjaan sulit, kebutuhan sehari-hari saja kurang tercukupi itupun hasil dari gali lubang tutup lubang”. Keterangan di atas secara tersurat dan tersirat penulis temukan dari beberapa warga Kelurahan Jamika.

Keadaan seperti yang dijelaskan di atas menguatkan muncul dan berkembangnya sikap-sikap yang merupakan bagian dari “kebudayaan kemiskinan”, khususnya di Jamika. Jika cara-cara kongkret yang membuat mereka menolong diri sendiri tidak ditemukan, lapangan-lapangan pekerjaan baru tidak diciptakan, program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pun dalam bentuk jaminan sosial tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan nasib ekonominya, maka kemiskinan dan “budaya kemiskinan” itu akan menghujamkan akarnya semakin dalam dan kokoh. Sikap hidup masyarakat yang mengalami kegagalan dalam hidup, akan menyaksikan kesamaan sikap masyarakat dengan apa yang disebut Lewis sebagai “budaya kemiskinan”. Kegagalan mereka yang terus-menerus, membuat kehilangan harapan, dan keyakinan diri mereka sendiri. Menurut Lewis, karakteristik yang muncul karena budaya kemiskinan tersebut diantaranya menerima nasib apa adanya, fatalistik, partisipasinya kecil, keterpinggiran, ketergantungan, kerendahan, kurang dalam mengawasi kekuatan, orientasi kekinian, maka dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun

¹¹ Wawancara, Rabu 6 September 2006

¹² Wawancara, Rabu 6 September 2006

2004, mereka cenderung mengambil keputusan tidak memilih. Jumlah masyarakat yang mengalami kegagalan hidup yang cukup besar telah menciptakan subkultur yang khas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan ada beberapa alasan kenapa sebagian masyarakat Jamika tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 diantaranya; *pertama*, memilih di TPS lain di luar kelurahan Jamika, *kedua*, memilih di kampung halamannya, dan *ketiga*, siapapun yang jadi tidak akan berpengaruh terhadap perubahan nasibnya. Terlepas dari alasan yang pertama dan kedua karena alasan itu memungkin mereka memilih atau tidak memilih, namun alasan yang ketiga sebuah alasan yang muncul karena sikap fatalistik. Sikap politik yang muncul karena adanya budaya kemiskinan.

Mereka (yang tidak memberikan suara) berpandangan siapapun presiden terpilih secara langsung tidak akan merubah nasibnya, terutama dari kemiskinan. Orientasi kekinian dapat dilihat bahwa mereka berpandangan lebih baik menggunakan waktu itu untuk bekerja, yang sudah jelas bagi mereka, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, kalau sehari tidak bekerja berisiko terhadap kebutuhan “dapurnya”. Seperti yang dikatakan Ican¹³ pada waktu pemilihan para pedagang tetap berjualan, ada yang berjualan masih disekitar kelurahan Jamika dan ada yang berjualan keluar Jamika, dan memungkinkan mereka tidak memberikan suaranya di TPS Kelurahan Jamika karena mereka berdagang sampai sore bahkan ada yang sampai malam, sedangkan untuk memilih di TPS di luar Kelurahan Jamika mereka tidak meminta kartu atau surat keterangan dari PPS supaya dapat memberikan suaranya di TPS-TPS yang ada di luar Kelurahan Jamika tersebut. Dapat dilihat di tempat-tempat pemungutan suara yang banyak tidak memberikan suaranya adalah tempat-tempat pemungutan suara yang penduduknya padat, ekonominya rendah. Memiliki rasa keterpinggiran, ketergantungan dan kerendahan menyebabkan mereka juga sulit untuk dapat berpartisipasi politik secara lebih luas, karena keterbatasan sumberdayanya, dan karena keterbatasan akses sumberdaya juga membuat mereka kurang dapat mengontrol kekuatan-kekuatan politik

Menurut keterangan dari Harun warga RW 3¹⁴ partisipasi politik (memberikan suara) masyarakat Jamika kalau di amati bukan disebabkan oleh bangunan kesadaran atas haknya sebagai warga negara yang setiap orang pilihan politiknya akan menentukan nasib bangsa kedepan, akan tetapi partisipasi politik mereka karena adanya mobilisasi penggalangan suara dari masing-masing tim sukses calon presiden dan wakil presiden. Karena keterbatasan akses sumberdaya, pilihan politiknya bukan berdasarkan kriteria-kriteria pemimpin bangsa yang diharapkan akan mampu membawa perubahan-perubahan kearah yang lebih baik, khususnya ada harapan yang cukup besar bahwa pilihan politiknya memperbaiki nasibnya, melainkan pilihan politiknya berdasarkan ajakan dari tim sukses calon presiden, memilih calon yang memberi atribut kampanye, memilih karena diberi uang oleh tim sukses, ikutan-ikutan pada pilihan banyak orang, mengikuti pilihan

¹³ Wawancara, Jum'at 8 September 2006

¹⁴ Wawancara, Jum'at 8 September 2006

keluarganya, atau mengikuti orang yang dianggap mengerti calon presiden dan wakil presiden yang dianggap baik. Selanjutnya Harun mengatakan, dirinya adalah salah satu orang yang melakukan penggalangan suara calon presiden, dan banyak warga yang meminta atribut kampanye bahkan ada yang meminta uang. Walaupun tidak dapat sajikan dalam bentuk angka berapa persen warga yang memilih karena alasan-alasan tersebut di atas, namun fenomena itu merupakan indikasi yang kuat bahwa partisipasi politik mereka pada pemilu presiden karena alasan yang telah dijelaskan di atas.

Alasan tidak memberikan suara karena adanya karakteristik budaya kemiskinan merupakan pembuktian bahwa budaya kemiskinan yang terinternalisasi pada golongan miskin masyarakat Jamika, dalam hal ini, budaya kemiskinan ada keterkaitan dengan keputusan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004, meskipun bukan satu-satunya alasan yang menyebabkan mereka tidak menggunakan hak pilihnya.

SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

- 1) Golongan miskin masyarakat Jamika ditandai oleh; a) tempat pemukiman yang padat, dengan ukuran bangunan rumah yang relatif kecil (antara 3 X 3 M² sampai dengan 4 X 6 M²), kualitas bangunan yang rendah, sanitasi yang tidak memenuhi syarat sehat; b)Tingkat pendidikan lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, bahkan sekitar 35% masih buta huruf; c) Bekerja di sektor informal sebagai pedagang kecil atau penjaga toko dengan gaji dibawah UMR (Upah Menimum Regional) bahkan masih banyak yang menganggur.
- 2) Kemiskinan masyarakat Jamika merupakan kemiskinan kultural dan struktural, kemiskinan kultural diindikasikan dengan rendahnya sumberdaya (pendidikan) masyarakat, adanya hambatan-hambatan budaya atau adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh golongan miskin. Kemiskinan struktural masyarakat Jamika yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan bagi golongan miskin
- 3) Sekitar 300 orang pemilih pada tiap tempat pemungutan suara, yang tidak memberikan suara cukup menyebar, tiap TPS selalu ada yang tidak memberikan suaranya. Namun, jumlah paling banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dapat di temukan di TPS-TPS yang berada di RW-RW yang mayoritas penduduknya miskin.
- 4) Keterkaitan antara budaya kemiskinan dan keputusan pemilih dari golongan miskin masyarakat Jamika, dapat ditemukan dari beberapa alasan tidak memberikan suara, pandangan mereka adalah siapapun presiden yang terpilih tidak akan dapat merubah nasibnya untuk keluar dari kemiskinan, tidak jauh beda dari presiden terdahulu, dan presiden yang akan terpilih pun, akan memimpin bangsa seperti presiden-presiden terdahulu.

4.2. Saran

- 1) Kepada pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan perhatian khusus dan program yang nyata pada pembangunan warga Kelurahan Jamika terutama untuk perbaikan ekonomi dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian secara cermat, untuk menemukan program-program pengentasan kemiskinan yang tepat agar masyarakat dengan segera terlepas dari kemiskinan. Penataan ulang pemukiman masyarakat yang lebih baik, karena tidak bisa pungkiri pemukiman Jamika saat ini benar-benar tidak teratur.
- 2) Pemerintah juga harus memberikan pemahaman atau pendidikan politik yang maksimal terhadap warga Jamika supaya partisipasi politik benar-benar atas kesadarannya sebagai warga negara yang baik, dalam hal ini, bukan berarti pemerintah menjadi alat kepentingan partai politik.
- 3) Pada para peneliti perlu dilakukan penelitian melalui pendekatan kuantitatif agar dapat saling melengkapi terhadap hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, dengan kajian yang sama yaitu tentang partisipasi masyarakat miskin perkotaan terhadap pemilihan presiden studi kasus pada masyarakat Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, tentunya juga akan memberikan khazanah pengetahuan tambahan dalam perspektif yang berbeda dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan untuk setiap proses-proses politik yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar (Sebuah Bunga Rampai)*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Garna, Jusditira. K. 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Primaco Akademika.
- Guggler, J., 1998, *Urbanisasi dan Kemiskinan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kota Bandung, 2004, *Daftar Pemilih dan Hasil Perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004*.
- Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Keduapuluhsatu.
- Santosa dan Salam, 2004, *Menuju Presiden RI 2004: Pertarungan Strategi, Koalisis dan Kompromi*, Bandung: PT. Sega Arsy.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yusar, 2004, *Apresiasi Masyarakat Miskin di Kota Bandung Terhadap Pasangan-pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2004*, Penelitian tidak diterbitkan.